

Lampiran 1

Sumber : <http://nasional.news.viva.co.id/news/read/471715-jadi-tersangka-korupsi-alkes--ini-pembelaan-ratu-atut>

Jadi Tersangka Korupsi Alkes, Ini Pembelaan Ratu Atut

Rabu, 8 Januari 2014 | 14:09 WIB

VIVAnews - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya menemukan dua alat bukti untuk menetapkan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah sebagai tersangka kasus kedua, yaitu dugaan korupsi alat kesehatan (alkes). Melalui pengacaranya, Ratu Atut menegaskan, semua proyek di pemerintahannya dilaksanakan secara kolektif.

"Saya sudah melihat fakta dan dokumen. Semua proyek, termasuk alkes, itu keputusannya kolektif. Proyek ini lolos dengan persetujuan dewan (DPRD Banten)," kata Firman Wijaya selaku pengacara Ratu Atut saat dihubungi VIVAnews, Rabu 8 Januari 2013.

Keluarga besar Ratu Atut pun ada di legislatif? "Tinggal dinilai saja nanti. Soal politik dinasti, tinggal dilihat saja secara transparan realita pembangunan. Sebelum dan sesudah dia (Ratu Atut). Ada tidak kemajuan dan kesejahteraan saat Ratu Atut?" ujar Firman.

Menurut Firman, ada tolak ukur untuk menilai seorang penyelenggara negara menyelewengkan kewenangan. Salah satunya, kata dia, dengan mencek apakah ada abuse of power dalam prosedur pengadaan sebuah proyek. Hal ini bisa dicek ke pemerintahan setempat. "Selain prosedur, lihat juga wewenang dan substansi," kata dia.

Selain itu, bisa juga dilihat apakah proyek itu hasil inisiatif pribadi penyelenggara yang bersangkutan atau tidak. "Kalau Ibu (Ratu Atut) jelas kolektif, bukan pribadi," klaim Firman.

Diberitakan sebelumnya, KPK menetapkan Ratu Atut sebagai tersangka proyek alkes, Selasa 7 Januari 2014. Informasi yang dikumpulkan VIVAnews, Ratu Atut diduga

menerima fee dari adiknya, Tubagus Chaeri Wardana karena Ratu ikut mengatur PT Bali Pasific Pragama milik Wawan sebagai pemenang tender.

Ratu Atut saat ini ditahan karena dia juga merupakan tersangka kasus penyuapan terhadap mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar. KPK menduga, Ratu Atut bersama-sama dengan Tubagus Chaeri, menyuap Akil Rp1 miliar terkait perkara sengketa pilkada di Lebak, Banten.



Lampiran 2

Sumber : <http://www.antaraneews.com/berita/412939/atut-dan-wawan-jadi-tersangka-korupsi-alkes-banten>

Atut dan Wawan jadi tersangka korupsi alkes Banten

Selasa, 7 Januari 2014 20:41 WIB | 6.053 Views

Jakarta (ANTARA News) - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah (RAC) dan adiknya yang Komisararis Utama PT Bali Pacific Pragama (BPP) Tubagus Chaeri Wardana (TCW) menjadi tersangka dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan (alkes) di Provinsi Banten 2011 hingga 2013.

"Setelah melakukan penyelidikan secara mendalam terkait dugaan tindak pidana korupsi pengadaan sarana dan prasarana Alat Kesehatan provinsi Banten 2011-2013, penyidik telah menemukan dua alat bukti yang cukup," kata Juru Bicara KPK Johan Budi di Jakarta, Selasa.

Ia menimpali, "Kemudian disimpulkan kasus ini bisa ditingkatkan ke penyidikan dengan tersangka RAC, yaitu Gubernur Banten dan saudara TCW selaku Komisararis Utama PT BPP."

Keduanya disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 undnag-undang (UU) Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah UU Nomor 20 tahun 2001 jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP tentang setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara dengan ancaman pidana maksimal 20 tahun penjara dan denda Rp1 miliar.

"Sprindik ini ditetapkan sejak 6 Januari," ujar Johan.

Dugaan modus yang dilakukan Atut dan Wawan adalah melakukan penggelembungan dana, dan keduanya memerintahkan pemenangan tender perusahaan yang diduga juga ada penerimaan komisi.

"RAC diduga menyalahgunakan jabatannya sebagai gubernur dan mengakibatkan kerugian negara serta menguntungkan diri sendiri dan korporasi, tapi mengenai total anggaran dan dugaan kerugian masih ditanyakan ke penyidik," kata Johan.

Ia pun mengungkapkan adanya kemungkinan tersangka lainnya.

"Kasus ini masih dikembangkan, kalau ditemukan dua alat bukti yang cukup maka tidak tertutup kemungkinan ada pihak-pihak lain yang terlibat dari hasil pengembangan penyidik," ujarnya.

Atut kini menjadi tersangka dalam dua kasus di KPK, yaitu dugaan korupsi pengadaan alkes Banten dan dugaan suap kepada Akil Mochtar saat menjabat Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) terkait pemilihan kepala daerah (pilkada) Kabupaten Lebak.

Adapun Wawan menjadi tersangka untuk tiga kasus, yaitu pilkada Lebak dan korupsi alkes kedokteran umum di pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) kota Tangerang Selatan pada tahun anggaran 2012.

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) setidaknya menemukan tiga indikasi penyimpangan dalam pengadaan alat kesehatan di Banteng yang mencapai Rp30 miliar.

BPK merinci, penyimpangan itu berupa alkes tidak lengkap senilai Rp5,7 miliar, alkes tidak sesuai spesifikasi senilai Rp6,3 miliar dan alkes tidak ada saat pemeriksaan fisik senilai Rp18,1 miliar.

Lampiran 3

Sumber : <http://bantenraya.com/utama/hukum-a-kriminal/9771-sidang-kasus-alkes-kota-tangsel>

Mamak Divonis 4 Tahun Penjara

Selasa, 03 Februari 2015 | 10:22 WIB

SERANG - Mantan Kepala Bidang Sumber Daya dan Promosi Kesehatan pada Dinas Kesehatan (Dinkes) Kota Tangsel Mamak Jamaksari dijatuhi vonis 4 tahun penjara oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Serang, Senin (2/2).

Dalam sidang yang dipimpin hakim Annastacia Tyas, Mamak selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) proyek pengadaan alkes di Dinkes Kota Tangsel senilai Rp 23,5 miliar ini dinilai terbukti bersalah melakukan korupsi bersama-sama dengan Tb Chaeri Wardana alias Wawan selaku Komisaris Utama PT Bali Pacifik Pragama (BPP), Dadang Prijatna (Manajer Operasional PT BPP), Dirut PT Mikkindo Adiguna Pratama Agus Marwan dan Dirut PT Java Medika Yuni Astuti.

Selain pidana penjara, terdakwa juga didenda membayar Rp 250 juta subsider 1 bulan penjara dan uang pengganti Rp 37 juta subsider 3 bulan kurungan. "Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa Mamak Jamaksari selama 4 tahun penjara," kata hakim Annastacia dalam sidang dengan JPU KPK, kemarin.

Vonis yang dijatuhkan majelis hakim lebih ringan 6 bulan dari tuntutan jaksa KPK. Perbuatan terdakwa Mamak dinilai telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan primer Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana.

Hal yang meringankan menurut hakim, terdakwa sopan selama dalam persidangan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, memiliki tanggungan keluarga, mengabdikan sebagai PNS dan belum pernah dijatuhi sanksi. "Terdakwa belum pernah dihukum serta telah mengembalikan uang Rp 37 juta," ujar Annas.

Dalam uraiannya, majelis hakim mengungkapkan bahwa terdakwa telah memerintahkan Ketua Tim Pokja ULP 2012 Ahmad Bajuri untuk memberikan surat-surat dokumen persyaratan lelang, dan membuat waktu lelang singkat di bawah koordinasi PT BPP sehingga tidak ada waktu bagi perusahaan lain untuk mengaksesnya.

Dari beberapa perusahaan yang mendaftar, hanya perusahaan yang berada di bawah koordinasi PT BPP yang lolos."Perusahaan yang tidak ikut lelang melaksanakan pengadaan dengan nilai proyek ditetapkan sebesar Rp 23,9 miliar. Pemenang lelang tidak melaksanakan proyek," kata majelis hakim.

Proyek tersebut dimenangkan oleh PT Mikkindo Adiguna Pratama milik Agus Marwan, namun dalam pengadaan alkes tersebut dilakukan oleh Yuni Astuti selaku Dirut PT Java Medika. Pembayaran proyek tersebut juga dilakukan dengan ditransfer ke rekening Yayah Rodiyah, bendahara PT BPP."Perbuatan terdakwa dalam proyek itu telah menguntungkan Wawan Rp 7 miliar lebih, Yuni Astuti Rp 5 miliar, Dadang Prijatna Rp 1,1 miliar, Agus Rp 200 juta, Dadang M Epid Rp 103 juta, dan terdakwa sendiri Rp 37 juta," kata majelis hakim menguraikan unsur turut serta melakukan.

Terkait pihak lain yang terlibat sebagaimana pembelaan terdakwa, majelis hakim mempertimbangkan bahwa pengadilan hanya mengadili perkara yang diajukan, sementara pihak lain yang belum diajukan bukan kewenangannya. Dalam kasus ini, KPK juga telah menetapkan Wawan dan Dadang Prijatna sebagai tersangka. Namun, terdakwa yang saat itu dalam keadaan sehat tetap melaksanakan perbuatan yang tidak baik, padahal memiliki waktu cukup lama untuk memikirkannya. "Terdakwa bisa melaporkannya kepada pihak yang berwajib karena terdakwa tidak dalam terbelenggu," ungkap majelis hakim.

Kepala Dinkes Tangsel Dadang M Epid meminta kepada terdakwa Mamak agar mengamankan proyek alkes karena akan dikerjakan oleh perusahaan dari Serang (PT BPP). "Terdakwa harusnya tidak ikut, malah ikut rapat dengan Dadang M Epid, dan Dadang Prijatna di gudang dinkes," jelasnya lagi.

Mengenai uang Rp 20 juta yang diakui Mamak sebagai upahnya sebagai PPK tidak dapat dibuktikan. Terdakwa dinilai telah mempunyai niat, karena memberikan surat-surat dokumen ke Yuni Astuti.

Usai mendengarkan putusan, terdakwa Mamak melalui kuasa hukumnya dari lembaga bantuan hukum menyatakan pikir-pikir.

Lampiran 4

Sumber : <http://www.radarbanten.co.id/dadang-prijatna-diganjar-4-tahun-penjara-terkait-korupsi-alkes-tangsel/>

Dadang Prijatna Diganjar 4 Tahun Penjara Terkait Korupsi Alkes Tangsel

Senin, 26 Oktober 2015 16:25

SERANG – Manager Operasional PT Bali Pacific Pragama, Dadang Prijatna dinyatakan terbukti bersalah melakukan pengaturan pemenang proyek pengadaan Alat Kesehatan (alkes) kedokteran umum Puskesmas Kota Tangsel pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2012.

Majlis hakim yang dipimpin oleh Jesden Purba menjatuhkan vonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp 200 juta subsidi tiga bulan kurungan. Uang hasil kejahatan korupsi Rp 103 juta telah Dadang kembalikan dalam persidangan sebelumnya.

Dadang dianggap melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana dan Pasal 3 jo Pasal 18 undang-undang yang sama jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidaana. Dadang di pidana penjara selama empat tahun dan denda Rp200 juta subsidair dengan pidana kurungan selama satu bulan

Vonis ini sama dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada sidang sebelumnya. JPU menilai bahwa tuntutan tersebut sudah mempertimbangkan aspek yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah untuk memberantas korupsi, kolusi dan nepotisme.

Hal-hal yang memberatkan terdakwa karena tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan korupsi, merugikan keuangan negara dan bersama-sama merencanakan perbuatan jahat. Sedangkan hal yang meringankan karena Dadang belum pernah dihukum, berlaku kooperatif selama persidangan, mengembalikan keuangan hasil korupsi dan ditetapkan sebagai justice collaborator atau saksi mitra pengungkap kejahatan oleh pimpinan KPK.

Dadang dianggap memperkaya diri sebesar Rp 103 juta bersama-sama dengan pemilik PT BPP, Tubagus Chaeri Wardana, suami Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel) Airin Rachmi Diany itu sebesar Rp7,941 miliar sert Ratu Atut Chosiyah sebesar Rp1.059 miliar.

Selain itu, terdakwa bersama-sama memperkaya dengan pimpinan Java Medica Yuni Astuti sebesar Rp5,064 miliar, mantan Kadinkes Tangsel Dadang M Epid Rp1,176 miliar, Direktur Utama PT Mikkindo Adiguna Pratama Agus Marwan alias Miko Rp206,932 juta dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Mamak Jamaksari sebesar Rp37,5 juta. Total kerugian negara akibat tindakan ini mencapai Rp14,528 miliar.

Atas vonis yang dijatuhkan majlis hakim ini Dadang Prijatna menyatakan menerima tanpa pikir-pikir untuk banding. "Saya menerima yang mulia," ujar Dadang.

Untuk diketahui, selama sidang, jaksa penuntut umum menghadirkan sebanyak 30 saksi, seperti Wali Kota Tangerang Selatan, Airin Rachmi Diany, Tubagus Chaeri Wardana, mantan Sekda Tangsel Dudung E Diredja, Kepala Dinas Pendidikan Methodah, mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kota Tangerang Selatan, Uus Kusnadi, mantan Kepala Bappeda Kota Tangerang Selatan Edi Malonda.

Dalam persidangan sebelumnya untuk terdakwa Mamak Jamaksari, mantan Kepala Bidang Promosi Kesehatan dan Sumber Daya Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Tangsel, terungkap fakta bahwa adik kandung mantan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah yakni Wawan menarik fee sebesar 43,5 persen dari real cost proyek pengadaan alkes untuk kedokteran umum di Puskesmas Kota Tangsel dengan nilai kontrak sebesar Rp 23,109 miliar.

Real cost yang dimaksud yakni nilai riil proyek setelah dipotong pajak pertambahan nilai (PPn) 10 persen dan pajak penghasilan (PPh) 1,5 persen atau sebesar Rp20,693 miliar. Jadi jumlah fee yang ditarik Wawan dari proyek pengadaan alkes pada APBD Perubahan 2012 Kota Tangsel tersebut sebesar Rp9,001 miliar.

Lampiran 5

Sumber : <https://nasional.tempo.co/read/news/2014/01/15/063544863/ratu-atut-kini-tersangka-3-kasus-korupsi-banten>

Ratu Atut Kini Tersangka 3 Kasus Korupsi Banten

TEMPO.CO , Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi menerbitkan surat perintah penyidikan baru untuk Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah. Setelah menjadi tersangka kasus korupsi penanganan sengketa pemilihan kepala daerah Lebak, Banten, dan pengadaan alat kesehatan di Banten, Atut kini dijadikan tersangka gratifikasi.

“Di antaranya dari proyek alat kesehatan di Banten,” kata juru bicara KPK, Johan Budi, Selasa, 14 Januari 2014. Dalam konferensi pers pada Senin lalu, ia menyebutkan penyidik telah menemukan dua bukti permulaan yang cukup.

Berikut penjelasan singkat ketiga kasus yang menjerat Atut itu:

1. Kasus sengketa Pemilukada Lebak, Banten, yang ditangani Mahkamah Konstitusi

Peran: Atut bersama adiknya, Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, diduga memberikan suap sebesar Rp 1 miliar kepada Akil Mochtar (kala itu Ketua MK) melalui seorang advokat Susi Tur Andayani, yang juga telah menjadi tersangka kasus yang sama.

Pasal yang menjerat: Pasal 6 ayat 1 huruf a Undang-undang No 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dalam UU No 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidan. Dengan ancaman hukuman pidana penjara 3-15 tahun, denda Rp 150-Rp 750 juta.

2. Korupsi pengadaan sarana dan prasarana alat kesehatan Provinsi Banten 2011-2013

Peran: Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, mengatakan Atut bertanggung jawab sebagai pengguna anggaran. Wawan juga menjadi tersangka dalam kasus ini. Baca juga: Airin Siap Jika Harta Suaminya Disita.

Pasal yang menjerat: Pasal 2 Ayat 1 dan atau Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHPidana. Ancaman Pasal 2 adalah pidana penjara 4-20 tahun, dan denda Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 3 pidana penjara selama 1-20 tahun, dan denda Rp 50 juta-Rp 1 miliar.

3. Penerimaan gratifikasi atau pemerasan

Peran: Belum dijelaskan. Namun, juru bicara KPK Johan Budi S.P. saat jumpa pers mengatakan penetapan ini merupakan hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di Provinsi Banten pada 2011-2013.

Pasal yang dijeratkan: Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 5 Ayat 2 atau Pasal 11 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. Ancaman Pasal 12 adalah 4-20 tahun penjara, dan Rp 200 juta-Rp 1 miliar. Sedangkan Pasal 5 dan Pasal 11 adalah pidana penjara selama 1-5 tahun, dan denda Rp 50-Rp 250 juta. Bantahan Atut di sini.

Lampiran 6

Transkrip Rekaman Wawancara

Narasumber : *Staaaf* Indonesia Corruption Watch (ICW)

Keterangan :

WC : William Christiawan

AI : Staff Indonesia Corruption Watch (ICW)

1. WC : Siang mas, ini William yang tadi minta bantuan untuk skripsi mas
2. AI : Iya tau. Langsung aja pertanyaannya apa?
3. WC : Yang pertama mas, kemarin kan saya sudah sempat mencari beberapa informasi mengenai pembuatan Aliansi Masyarakat Anti Korupsi di Banten pada tahun 2010-2012 itu sangat susah. Kenapa mas?
4. AI : Iya, kalau di Banten *problem* yang utama yaitu *problem* internal dan eksternal. Yang internal yaitu ketakutan yang berlebihan menghadapi rezim yang didukung oleh para jawarah, memiliki jaringan yang luas. Di sisi lain juga belum terlalu banyak kaum intelektual walaupun memang banyak aktivis yang kritis dari Banten namun yang *stay* di Banten tidak terlalu banyak. Problem yang lain terkait dengan masalah logistic. Jadi itu beberapa masalah, tapi yang paling utama yaitu bicara masalah ketakutan. Walau saya bilang itu ketakutan yang berlebihan, menciptakan ketakutan di kepala sendiri. Dan faktir eksternalnya karena tradisi intelektual, masih kalah dengan tradisi kejawarahan, dan tradisi kekerasan sehingga kelompok pelawan bisa tumbuh subur di Banten, yang ada hanya kelompok pelawan 00 bandng 1 walau saya bilang itu sudah agak lebih baik karena menurut saya seblumnya tidak ada. Kalau lihat di sana, banyak wartawan yang mulai memelopori dan berkolaborasi dengan dosen kritis dan mahasiswa. Namun *problemnya* adalah kalau bicara ada ya ada tapi perlawanannya tidak sistematis. Mereka kalau aksi ya aksi, sekali pukul, bicara, namun tidak ada upaya serius untuk mengkritisi ezim. Kalau di Banten dibbilang rezim korup, tidak ada upaya untuk membongkarnya, mungkin karena ada masalah kemampuan teknis, kemampuan mengungkap kasus, menginvestigasi

5. WX : Kalau boleh menyambung yang tadi mas, masyarakat kan seolah cuek dengan rezim yang ada, apakah itu ada kaitannya dengan dinasti Ratu Atut di Banten itu?
6. AI : Sebenarnya masalah cuek ini tidak hanya di Banten saja. Ini *problem* di masyarakat Indonesia secara umum. Kalau melihat riset-riset yang dibuat oleh teman-teman seperti Syarif Hidayat, *problem* di masyarakat Indonesia adalah *democratic behavior* paling tidak pada tingkatan rakyat, posisi rakyat dan negara itu timpang termasuk yaa ni peran negara yang diwakilkan dinasti Atut ini mampu mengkonsolidasikan diri, mereka mampu mengkonsolidasi kekuatan politik, kekuatan ekonomi termasuk di dalamnya tokoh agama dan masyarakat sehingga mereka bisa meredam perlawanan dari masyarakat. Ini sudah dikonsolidasikan oleh dinasti. Tidak ada kelompok terdidik, yah tidak banyaklah yang kemudian mengorganisir buat memberdayakan rakyat di Banten sehingga tidak ada perlawanan, bahkan kesadaran yang mereka di rampok, di korup tidak banyak muncul. Tapi saya piker ini penyakit juga muncul di banyak daerah.
7. WX : Oh gitu, Ini kan skripsi saya mengenai korupsi pengadaan alat kesehatan tahun anggaran 2012 tapi itu masalah kan sejak tahun 2010 ya mas?
8. AI : Ya
9. WC : Sebenarnya saat IVW *mengaudit* kasus tersebut, apa sih yang ditemukan ICW?
10. AI : Problem yang pertama ya di anggaran, bagaimana keluarga Ratu Atut mampu mengkonsolidasikan kekuatan mereka termasuk dalam perencanaan anggarannya. Jadi anggaran-anggaran pengadaan sudah secara *otomatis* dimenangkan mereka. Jadi, sudah diarahkan ke sana. Seperti penganggaran alat kesehatan ini ya dimenangkan oleh perusahaan milik dan yang *teraviliasi* dengan dinasti Atut. Pasti. Kalo masalah proses, mereka ikut proses seperti proses *Piding*, kalau dari temuan kami ya yang ikut proses *Piding* ya perusahaan mereka semua. Jadi walaupun menang ya gentian, ya perusahaan yang milik Atut atau yang *teraviliasi* dengan dinastinya. Api menurut saya ini kan *problem* bukan cuma di hilir dalam artian proses pengadaan. Tapi ini sudah terjadi di hulu saat perencanaan anggaran..
11. WC : Tadi kan mas bilang ada konsolidasi antara dinasti Atut dari perencanaan hingga pebfaaab debfab pihak terkait.
12. AI : Ya
13. WC : Kosolidasinya dalam bentuk apa ya mas? Maksudnya secara *real* apakah ada pemaksaan atau intervensi gitu?

14. AI : Ya mereka bungkam. Misalnya yang kami temukan pada tahap perencanaan anggaran ya mereka dapat *upeti*. Misalnya mereka mendapat hadiah, atau kado akhir tahun dari keluarga gubernur misalnya memberikan mobil, uang pada anggota PRD yang sudah memuluskan anggaran atau mereka diberikan kompensasi proyek. Jadi, ya mereka diatur oleh keluarga gubernur. Nah itu yang saya maksud dengan konsolidasi. Jadi kebereadaan mereka bukan untuk melakukan pengawasan, untuk memastikan anggaran ada dan digunakan untuk rakyat tapi tugas mereka adalah untuk memastikan bahwa proyek dimenangkan oleh keluarga Atut. Sehingga saat usulan anggaran ya mereka tidak akan resek. Beda dengan sekarang ketika Roro Karno ketika ada usulan anggaran, DPRDnya resek karena belum ada konsolidasinya. Atau Jakarta yang kelihatan ya, ketika Ahok mau ngasi anggaran untuk mereka, *diresekin* sehingga anggarannya tidak turun.
15. WC : Dalam pengadaan misalnya pengadaan alat kesehatan ini, sebenarnya perusahaan kompetitor di luar perusahaan milik dan yang teraviliasi itu apakah mereka cukup *compatible* atau mereka dibuat menjadi tidak *compatible* untuk pengadaan ini mas?
16. AI : Kalau bicara masalah kemampuan, perusahaan lain juga bagus malah ada yang jauh lebih bagus Cuma mereka tidak bisa masuk. Banyak *barrier* yang keluarga gubernur bikin dengan kemampuan yang mereka miliki. *Varrier barrier* yang membuat perusahaan lain itu tidak bisa masuk. Atau pun kalau bisa masuk, harus mau berkompromi dengan keluarga gubernur. Misalnya kalau mereka tidak mau memberikan *fee*, atau yang banyak kami temukan adalah *upeti* misalnya kalau mereka mau proyek, mereka harus kasih *upeti* 30% atau berapa persen kepada perusahaan atau keluarga dinasti. Kalau tidak mau, ya mereka tidak bisa masuk. Walaupun misalnya dibuat tender, tapi itukan hanya akal-akalan saja dan dengan mudah bisa dikalahkan. Saya dulu saat riset dengan Wadinkes, kami juga sempat bertemu dengan beberapa orang di Kadin *ngomong* kalau dibuat terbuka, mereka yakin bisa menang tapi jadi tidak bisa karena kondisinya saat itu. Soalnya pemenang tender sudah ditentukan sebelum tender, bukan sebelum tender bahkan sebelum anggaran disusun.
17. WC : Hallo?
18. Ai : Ya?
19. WC : Mas untuk masalah Kadin. Pada saat 2012 itu kan adik dari Ratut Atut Tubags Chaeri Wardana itu menjabat sebagai Ketua Kadin Banten ya mas?

20. AI : Ya. Seperti yang saya bilang, mereka akan mengkonsolidasikan dengan Kadin ini. Kalau berdasar teori, di Banten ini ya *oligarki, oligarki klan* yak arena keluarga Ratu Atut ini menguasai semua sektor formal informal termasuk aparat.
21. WC : Terus mas untuk penerima barang, apakah mereka tidak melakukan proes kenapa barangnya seperti ini, tidak sesuai spesifikasi yang mereka inginkan mas?
22. AI : Ya dengan kondisi saat itu, aoa mereka bisa protes? Kalau missal kepala Dinkes adalah orang mereka, orang keluarga Atut apakah mereka berani protes? Atau missal RSUD yang ditempatkan adalah orang mereka apakah mereka berai protes? Kan *enggak*. Apalagi mereka sering dapat *rente* dari proyek kecil gitu ya. Ketika teman kami ketemu dengan orang Dinkes, ya mereka tau mereka salah tapi mereka tidak punya pilihan. Bagi PNS, mereka harus tunduk dan patuh teradap atasan. Ya itu cara pandang mereka sebagai birokrat. Dan juga mereka dapat *rente* walau tidak *gede*.
23. WC : Apakah dalam proses pengadaan lai selalu di menangkan perusahaan keluarga Atut mas?
24. AI : Ya. ya benar
25. WC : Apakah perusahaan lain tidak pernah menang mas?
26. AI : Saya tidak tahu pasti. Tapi yang jelas hamper semua
27. WC : Kalau kita bicara mengenai Banten, kita tahu dari hulu sampai hilir dikuasai oleh Ratu Atut. Namun dari segi pemerintahan, di sana ada tiga dinasti yang ada. Apakah dinasti yang lain juga sama korup?
28. AI : Iya. Iya. Kecenderungan mereka melakukan dinasti kan pertanyaannya apakah untuk gagah-gaha? Kan *enggak*. Mereka membuat dinasti itu kan untuk mempermudah untuk masuk ke dalam akses ekonomi terutama proyek-proyek APBD. Jadi kelakuannya hamper sama ya. Misalnya dinasti Jayabaya di Lebak, ya mereka sama, tipikalnya juga pengusaha. Jadi tujuannya sekali lagi bukan untuk gagah-gahan tapi untuk masuk ke dalam akses ekonomi. Tapi kami minggu-minggu ini mengeluarkan buku termasuk sejarah pembentukan Banten, korupsi alat kesehatan. Kami buat buku judulnya tuh “Dinasti Banten; Keruntuhan dan Kebangkitannya kembali”. Mudah-mudahan sudah ada.
29. WC : Oke coba nanti saya cari mas. Kemudian mas, untuk modus dari kasus ini tuh apakah dengan pengelembungan harga atau seperti apa mas?
30. AI : Kalau kita bicara masalah modus, ada tiga focus, Pertama perencanaan tender, pembuatan anggaran, dan pelaksanaan proyek gitu.

Modus di focus pertama mereka akan membuat anggaran yang bisa dimenangkan oleh perusahaan keluarga Atut. Atau proyek-proyek yang sudah ada, kemudian diarahkan ke perusahaan keluarga Atut. Jadi yang menang nantinya sudah jelas. Yang kedua saat tender, kan formalnya dibuat tim tender, dan tim itu menurut temuan kami tugasnya untuk memuluskan perusahaan-perusahaan yang sudah akan memenangkan proyek. Misalnya sudah ada perintah dari gubernur atau kepala daerah yang memenangkan tender adalah perusahaan ABC, nah si tim tender hanya memastikan saja agar supaya kelihatan benar, di utak-atiklah masalah *Pidding* sehingga jika ada missal kekurangan dokumen, mereka yang akan melengkapi. Jadi tugas mereka sevara teknis itu. Ya mereka melakukan itu karena di perintah oleh atasan mereka misalnya oleh kepala dinas, kepala dinasnya diperintah oleh keluarga gubernur atau gubernurnya sendiri. Yang ketiga saat implementasi. Implementasi kan biasanya pembelian atau jasa. Misalnya saat pembelian itu *mark up* alkes gitu ya missal harga Rp 100.000.000 atau missal kami menemukan harga Rp 100.000.000 atau Rp 250.000.000 di *mark up* jadi Rp 1,5Miliar. Yah model-model seperti itu. Atau missal pembangunan jalan atau infrastruktur yang lain.

31. WC Oke gitu aja mas. Terima kasih

32. AI :Ya. Sama-sama

Lampiran 18

Transkrip Rekaman Wawancara

Narasumber : ST (Staff Dinas Kesehatan Banten)

Keterangan :

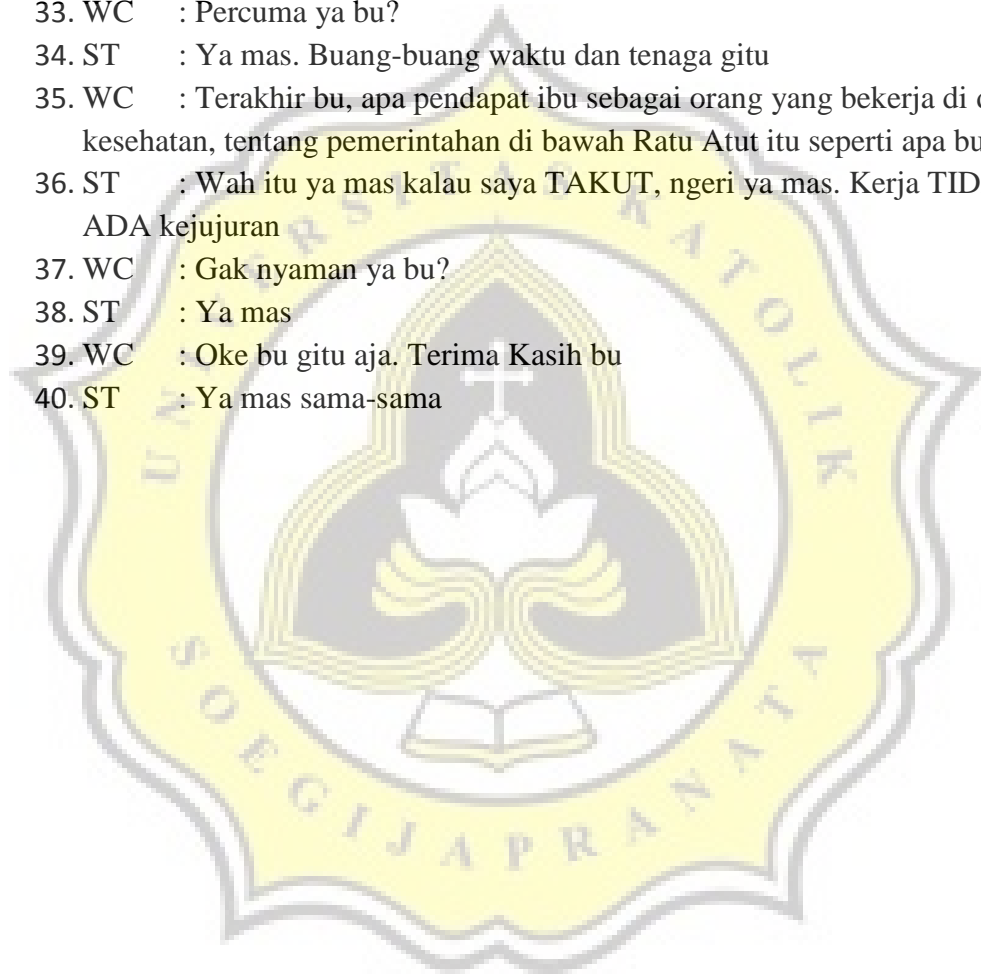
WC : William Christiawan

ST : Staff Dinas Kesehatan Banten

1. WC : Pagi bu
2. ST : Ya mas pagi juga
3. WX : Bu, di DinKes ini banyak orang asli Banten *gak* bu?
4. ST : Ya lumayan mas. Tapi yang saya tau masih pada eselon bawah mas. Yang *gede-gede sih* bukan orang sini ada orang Bandung, dari Bogor. Kalau Dinas lainnya sih kayaknya hampir semua juga gitu deh mas. Jarang *banget* ada orang gede maksudnya yang jadi pejabat tuh dari orang sini mas
5. WC : Kok bisa seperti itu kenapa bu?
6. ST : Duh saya juga kurang paham mas. Kalau bicara pendidikan ya orang sini juga *gak bodo-bodo amat*. Ada yg S2 aja baru eselon 3. Ya kita *sih* yang penting kerja aja si mas.
7. WC : Oh gitu. Bu, untuk masalah yang Alkes 2012 nih bu. Kalau pada waktu itu prosesnya tuh seperti apa sib bu? maksudnya perencanaan sampai pelaksanaannya waktu itu seperti apa bu?
8. ST : Ni kebanyakan ya mas, termasuk waktu mau ngadain Alkes, ya semua kalau di lihat dari luar prosesnya ya bagus, rapi, jujur. Tahapannya sesuai aturan. Tapi kalau mas masuk lebih dalam lagi, baru mas tu kecurangannya. Semua tuh pada *money oriented* kalau saya boleh istilahkan mas. Jadi, dari awal tu kita udah susun gimana caranya supaya yang menang nantinya perusahaan ibu Ratu. Soalnya, nanti kita biasanya dapat bonus ya bisa uang, atau apapun dari Ibu Ratu
9. WC : Kalau ada yang tidak mau memuluskan rencana itu bagaimana bu?
10. ST : Yang saya tau si belum pernah ada. Tapi dulu di dinas lain pernah ada sih mas. Itu sampai keluarganya di terror macem-macem, di SMS lah, di telpon-telpon lah

11. WC : Diancem gitu ya bu?
12. ST : Ya di ancem gitu supaya gak macem-macem, supaya bisa ngelancarin kemenangan Ibu Ratu. Gitu mas.
13. WC : Ibu sendiri *gak* berani protes bu?
14. ST : *Enggak* mas. Istilahnya protes tu maut mas. Bisa-bisa besoknya saya di pecat mas, terus *gak* bisa makan mas.
15. WC : Oh gitu. Itu kan tahap perencanaannya bu. Kalau waktu pelaksanaan tender *gimana* bu?
16. ST : Sama aja mas kalau *pas* pelaksanaan. Orang-orang kita sudah terbiasa kerja untuk Ibu Rtu. Kalau misalnya ada ya bu Ratu harus menang mas. Semua proyek harus dimenangkan Ibu Ratu.
17. WC : Kalau missal ada yang tidak mau nih bu, pernah ada yang di pecat gara-gara melawan bu?
18. ST : Saya tu agak lupa ya mas. Kayaknya dulu pernah deh mas. Itu di DinKes tapi sudah lama. Dia tu tidak mau curang gitu. Terus sebulan kemudian dia di pecat. Saya juga tidak terlalu paham alasannya apa, yang jelas dia di dikeluarkan mas.
19. WC : Kalau waktu pelaksanaan kontraknya sendiri, *gimana* bu?
20. ST : Kalau kontrak *sih* tugas kita tinggal gampang mas. Paling Cuma tanda tangan kontrak dan *ngasih* barang ke penerima
21. WC : Nah waktu *ngasih* barangnya nib bu. Pernah ada protes dari penerima bu? *Kok* barangnya seperti ini, kok tidak sesuai spesifikasi gitu bu?
22. ST : Tidak ada mas. Ya kalau di Tanya jujur-jujuran ya mungkin mereka mau protes sebenarnya mas. Tapi ya itu tadi, kita tidak mau cari masalah aja si mas. Takut mas. Lagian mereka juga berfikir kalau mereka akan dapat bagian juga kok
23. WC : Bagiannya uang, atau hadiah gitu ya bu?
24. ST : Iya mas.
25. WC : Kalau dari tadi kan ibu cerita kalau orang-orang di sini tuh sudah terpola untuk memenangkan keluarga Ratu Atut bu. Pernah kah ada usaha untuk melaporkan kecurangan itu bu?
26. ST : Takut mas. Lawannya orang *gede gitu*.
27. WC : Pernah tidak bu ada arahan langsung dari Ibu Ratu atau keluarganya kamu harus memenangkan perusahaan ini ini gitu bu?
28. ST : Kalau saya sendiri si tidak ada arahan apa-apa mas. Kalau yang lain tidak tahu. Kalau yang saya tahu si ya tidak ada mas. Cuma mungkin ada orang-orang Ibu Ratu yang ..

29. WC : Yang punya koneksi gitu ya bu?
30. ST : Ya mas gitu.
31. WC : Waktu pengadaan Alkes, adakah perusahaan di luar keluarga Ratu Atut atau yang teraviliasi yang ikut proses tender bu?
32. ST : Duh, saya gak lupa mas. Tapi kalau ada, paling Cuma satu dua mas. Soalnya mereka pada sudah tau kalau kalah.
33. WC : Percuma ya bu?
34. ST : Ya mas. Buang-buang waktu dan tenaga gitu
35. WC : Terakhir bu, apa pendapat ibu sebagai orang yang bekerja di dinas kesehatan, tentang pemerintahan di bawah Ratu Atut itu seperti apa bu?
36. ST : Wah itu ya mas kalau saya TAKUT, ngeri ya mas. Kerja TIDAK ADA kejujuran
37. WC : Gak nyaman ya bu?
38. ST : Ya mas
39. WC : Oke bu gitu aja. Terima Kasih bu
40. ST : Ya mas sama-sama



Lampiran 8

Sumber : ASatunews Edisi 2 (Oktober-November 2013)

Kisah Atut di (Bukan) Negeri Dongeng

Seperti bola salju yang terus menggelinding, begitulah tampaknya dugaan korupsi yang melanda keluarga besar Gubernur Banten Atut Chosiyah. Kamis lalu (24/10), misalnya, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad di Yogyakarta mengatakan akan segera memeriksa Walikota Tangerang Selatan, Banten, Airin Rachmi Diany. Airin adalah adik ipar Atut, istri dari Chaeri Wardana, yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi terkait kasus dugaan suap Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar.

Airin rencananya akan diperiksa untuk kasus dugaan korupsi pengadaan alat kesehatan di wilayah yang ia pimpin. Sementara itu, tak lama setelah adiknya ditangkap, Atut Chosiyah sudah dilarang berpergian ke luar negeri alias dicegah tangkal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Sudah sejak lama sebenarnya masyarakat, khususnya di Banten, muak dengan tingkah polah Atut Chosiyah dengan keluarga besarnya, yang rakus kekuasaan dan juga sangat rajin mengumpulkan harta kekayaan dengan berbagai cara, termasuk mengangangi berbagai proyek di Banten.

Yang kerap berbicara keras mengkritik keluarga itu adalah para aktivis yang bergabung dalam mailing list wongbanten, yang kemudian dipindahkan ke grup di Facebook dengan nama yang sama. Salah seorang di antara mereka adalah penulis fiksi produktif yang juga pendiri komunitas Rumah Dunia di Serang, Banten, Gol A Gong alias Heri Hendrayana Haris. Kekayaan Atut memang terbilang luar biasa. Pernah diberitakan, dia bahkan lebih kaya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Herannya, Atut terakhir kali melaporkan kekayaannya tujuh tahun lalu, tapi tidak ada seorang pun, termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi, yang berbicara. Padahal, laporan soal dugaan korupsi yang dilakukan Atut sudah lama dilakukan oleh banyak pihak ke Komisi Pemberantasan Korupsi.

Tujuh tahun lalu, total nilai kekayaan Atut hampir mencapai Rp 42 miliar. Dan, menurut juru bicara keluarga Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Fitron Nur Ikhsan, kekayaannya selama tujuh tahun belakangan ini terus bertambah, terutama karena warisan dari orang tuanya. Fitron yang tadinya dikenal sebagai aktivis duafa yang kerap mengkritisi Atut itu pun menyatakan,

semua yang diperoleh Atut dan keluarganya selama ini telah dibangun sejak lama dan dengan bersusah payah. Fitron boleh saja berbicara begitu. Namun, sumber kami yang pernah sangat dekat dengan ayah Atut, Chasan Sohib, punya cerita berbeda.

Sumber kami itu mengaku tahu benar bagaimana kondisi Chasan Sohib dan cara ia mengumpulkan kekayaannya. Untuk memudahkan, sebut saja sumber itu dengan inisial Y, walaupun itu bukan inisial namanya. Menurut Y, Chasan Sohib sejak awal menjadi pengusaha sudah melakukan banyak kolusi. “Awalnya, dia bekerja sama dengan Sutadi, yang waktu itu masih kepala seksidi Kabupaten Serang, yang masih menjadi bagian dari Provinsi Jawa Barat. Makanya, sebagai balas jasa, sewaktu Atut jadi wakil gubernur, Sutadi diangkat menjadi Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Provinsi Banten dan kemudian juga menjadi Pelaksana Tugas Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten.

Ketika Atut menjadi Gubernur Banten, Sutadi secara resmi diangkat menjadi Kepala Dinas Bina Marga dan Tata Ruang Provinsi Banten, padahal masih banyak senior di atasnya,” ungkap Y. Sutadi ini, lanjut Y, pada tahun lalu pernah diperiksa Kejaksaan Tinggi

Banten. “Dia waktu itu dipanggil hanya sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi pengadaan lahan Gerai Samsat Sepatan di Kapubanten Tangerang,” ujar Y. Namun, pertemuan Chasan Sohib dengan Sutadi terjadi belakangan, setelah Chasan Sohib punya CV Sinar Ciomas. “Awalnya, tahun 1960-an, Chasan Sohib berjualan kelapa. Ia mengirim kelapa sampai ke Jakarta. Entah ribut atau entah karena sebab lain, Chasan Sohib dijebloskan ke penjara. Nah, keluar dari penjara, dia pada tahun 1960-an itu juga kemudian bekerja sebagai pengantar beras di perusahaan milik H. Tubagus Kaking,” kata Y.

Chasan di perusahaan Kaking adalah pekerja kasar. “Kalau ngantar beras ke Jakarta, misalnya, dia duduknya di bak truk, bukan di dalam dekat sopir,” tutur Y.

Cukup lama juga Chasan Sohib bekerja dengan H. Tubagus Kaking, sampai tahun 1970-an. “Sampai suatu hari, entah kenapa, Kaking menyuruh Chasan Sohib bikin perusahaan sendiri saja, keluar dari perusahaan Kaking,” ujar Y. Maka, pada tahun 1970-an, Chasan Sohib pun membuat CV Sinar Ciomas. “Kalau enggak salah, dia bikin CV itu tahun 1972. Ini hanya perusahaan kecil, dapat order kecil-kecilan dari Kodam Siliwangi. Tapi, kemudian, mulai dapat proyek pembuatan irigasi, berkat kerja samanya

dengan pegawai Kabupaten Serang, Sutadi itu. Tapi, sejak awal, proyek yang dikerjakan CV Sinar Ciomas memang bisa dibilang semuanya tak pernah beres. Tapi, karena Chasan Sohib selalu menggunakan kekerasan dan suka mengancam, apalagi ia juga dekat tentara, CV Sinar Ciomas terus

dapat proyek,” kata Y. Langkah Chasan Sohib semakin lebar setelah Gabungan Pelaksana Konstruksi Nasional (Gapensi) membuka perwakilan di Serang, tahun 1976. “Chasan Sohib diangkat sebagai ketuanya.

Tak puas menjadi Ketua Gapensi Banten, Chasan Sohib kemudian merebut kepemimpinan Kadin Banten. Prosedurnya memang dengan pemilihan, tapi prosesnya menuju ke sana menggunakan ancaman kekerasan,” ungkap Y lagi. Ketika itu, Chasan Sohib sudah menambahkan gelar “tubagus” di depan namanya. “Tapi, pemakaian gelar sempat dipertanyakan oleh Tubagus Kaking dan juga oleh Bupati Serang ketika itu, H. Tubagus Syafaruddin. Karena, asal-usul gelar keluarga tubagusnya tidak jelas,” ujar Y.

CV Sinar Ciomas juga sudah berganti menjadi perusahaan terbatas (PT). “Jadi, Chasan Sohib ingin main proyek juga di tingkat provinsi, makanya CV diganti PT. Tapi, ternyata nama PT Sinar Ciomas sudah ada yang punya di Bogor, makanya kemudian dipilih nama PT Sinar Ciomas Raya Kontraktor. Itu tahun 1980-an,” kata Y.

Pada masa ini, sebagai Ketua Kadin Banten, Chasan Sohib mewajibkan semua proyek yang masuk ke Banten harus lewat dia. “Dia juga membuat sistem consensus proyek. Dia diajari oleh seseorang yang memang sudah berpengalaman mengerjakan proyek pemerintah. Dengan sistem konsensus proyek ini, proyek-proyek yang masuk ke Banten dijadikan bancakan dan seperti arisan, tapi bagian Chasan Sohib selalu lebih besar. Sampai masa ini saja, proyek-proyek yang dikerjakan perusahaan Chasan Sohib masih tidak pernah beres,” papar Y.

Pada pertengahan decade 1980-an, PT Sinar Ciomas pun mulai merambah proyek-proyek yang ada di Provinsi Jawa Barat. Ketika itu, Ratu Atut sudah menikah dengan Hikmat Tomet. “Dia anak Bandung. Bapaknya tentara,” kata Y tentang asal-usul Tomet. Kiprah PT Sinar Ciomas Raya Kontraktor di Jawa Barat, Bandung khususnya, tak bisa dilepaskan dari peran Hikmat Tomet. “Ada pembagian tugas. Saya ingat, ini yang mengusulkan Tomet. Jadi, Hikmat Tomet yang mengintip dan mencari proyek, Chasan Sohib diminta Tomet untuk memberi tekanan kepada siapa saja yang mencoba menghalangi mereka untuk mendapatkan proyek itu,” tutur Y. Pada masa inilah Chasan Sohib dengan bendera PT Sinar Ciomas Raya Kontraktor merajalela ingin menguasai berbagai proyek yang didanai APBD dan juga APBN. “Dia juga kemudian membuat banyak perusahaan lain, untuk memperlancar kongkalikongnya,” ungkap Y.

Chasan Sochib lalu aktif di Golkar. “Dia itu masuk Golkar belakangan. Jadi, salah kalau dia dibilang sudah di Golkar sejak zaman Sekber Golkar. Dia masuk Golkar, ya, karena supaya lancer usahanya,” tutur Y. Ketika kekuasaan Orde Baru mulai digoyang banyak elemen masyarakat, Chasan Sochib awalnya tetap berkukuh membela Orde Baru. Bahkan, ia mengirimkan jawara Banten ke Jakarta untuk membantu ABRI mengatasi aksi demonstran. “Tapi, sewaktu Soeharto tumbang, dia beralih mendukung reformasi. Malah, dia paling semangat,” ujar Y lagi.

Ada kejadian lucu yang dilakukan Chasan Sochib pada awal reformasi. “Ini kejadian membuat geger Serang. Karena, dalam sebuah acara, Chasan Sochib diminta berpidato, untuk mendukung reformasi. Tapi, dia enggak mengerti itu apa sebenarnya reformasi. Maka, ketikapidato itu, dia bilang, ‘Mari kita lanjutkan pembangunan Orba.’ Banyak orang kaget, tapi enggak ada yang berani protes karena takut. Saya yakin dia mengatakan itu juga karena memang enggak mengerti,” kata Y. Ketika ada tuntutan Banten sebagai provinsi sendiri, memisahkan diri dari Jawa Barat, Chasan Sochib dan gerombolannya juga paling semangat.

Padahal, awalnya, dia sangat menentang pemisahan itu. “Waktu akhirnya Banten jadi provinsi dan akan diangkat gubernur dan wakil gubernur definitif, untuk menggantikan Pelaksana Tugas Gubernur Banten Hamuddin Djamal, Chasan Sohib mau jadi gubernur. Tapi, dia terganjal dengan syarat pendidikan formal. Singkat cerita, akhirnya dimajukanlah Ir. Djoko Munandar, yang waktu itu masih menjadi Wakil Walikota Cilegon, untuk menjadi Gubernur Banten,” tutur Y. Siapa yang akan menjadi wakilnya? “Seorang pengusaha kontraktor lalu meminta kepada Chasan Sochib untuk menjadi wakil gubernur. Ketika itulah, Chasan Sochib langsung terpikir untuk menjadikan istri Hikmat Tomet alias putrinya, Atut Chosiyah, untuk dipasangkan dengan Ir. Djoko Munandar. Ia pun memerintahkan Sekretaris Pendekar Banten, Gagan, SH, untuk menjemput Atut di Bandung,” papar Y.

Alkisah, dijemputlah Atut oleh Gagan. “Gagan, selain bawa temantemannya yang jawara, juga bawa penata rias dan pengarah gaya. Jadi, sebelum ke Serang, mereka membawa Atut ke Hotel Nikko (sekarang jadi Hotel Pullman) Jakarta dulu. Di hotel itu, Atut dipermak penampilannya, termasuk dipakaikan jilbab, dan diberi kursus supersingkat mengenai cara tampil serta berbicara di depan publik,” kata Y mengenang peristiwa lebih dari 10 tahun lalu itu. Mungkin karena perusahaan sudah sedemikian banyak, Chasan Sochib pun meminta agar seluruh perusahaannya diperiksa secara internal. “Maka, tahun 2001, Direktur Utama PT Sinar Ciomas Raya Kontraktor melakukan audit internal.

Ternyata, dari hasil audit itu diketahui, besarnya utang perusahaan-perusahaan milik Chasan Sochib lebih banyak dibanding dengan jumlah asetnya. Jadi, kalau ada yang bilang mereka sudah kaya sejak dulu, ya, mungkin maksudnya kaya dengan utang,”

ungkap Y. Boleh jadi begitu. Seorang psikolog yang tidak enggan disebutkan namanya mengatakan, perilaku Atut dan keluarganya yang terlihat begitu kemaruk kekuasaan dan juga kekayaan tak bisa dilepaskan dari masa lalunya.

“Mungkin dulunya Atut dan saudara-saudaranya pernah mengalami kesusahan hidup atau kelangkaan dalam memenuhi kebutuhan hidup atau karena hidupnya tertekan. Apalagi, katanya kan sang ayah menafkahi keluarganya dengan menghalalkan berbagai macam cara dan juga gemar berpoligami. Jadi, Atut dan saudaranya kemudian mengidap semacam sindroma kelangkaan. Karena merasa berkuasa dan tidak ada yang berani mengkritisi secara terbuka, Atut dan keluarganya menjadi bertindak seenak-enaknya. Ini semacam kita pergi ke toko swalayan, yang seolah membebaskan kita tanpa pengawasan untuk memilih dan membeli barang apa pun. Akhirnya, kita pun secara tidak sadar sering membeli barang yang sebenarnya tidak kita butuhkan, karena seolah kita tidak punya beban karena tidak diawasi dan juga tidak perlu melakukan tawar-menawar,” ujarnya.

